

Peran Pengawasan Internal Dalam Memoderasi Akuntabilitas Aparat Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Gabriella Arsani Linggom Silalahi, Aris Eddy Sarwono

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi UNISRI Surakarta
Jalan Sumpah Pemuda No 18 Joglo Kadipiro
Telp/. 0271 855717

E-mail: gabriellasilalahi2001@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh antara variabel akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah daerah, selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menguji peran variabel moderasi terhadap pengaruh antara akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan terhadap Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Karanganyar sebanyak 41 Organisasi Perangkat Daerah, jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengawasan internal memoderasi pengaruh antara akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah daerah.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Pengendalian Internal, Kinerja, Organisasi Perangkat Daerah.

Abstract

This study aims to examine the effect of the accountability variable on the performance of local government, besides that this study also aims to examine the role of the moderating variable on the effect of accountability and local government performance. This research was conducted on 41 Regional Apparatus Organizations in Karanganyar Regency, the type of data used is quantitative data. The data source used is primary data. The sampling technique was carried out using purposive sampling method. The results of the study indicate that accountability has an effect on the performance of local governments. The results of this study also show that internal control moderates the effect of accountability on local government performance.

Keywords: Local Government, Internal Control, Performance, Regional Apparatus Organization.

1. Pendahuluan

Kondisi kinerja pemerintah daerah memiliki arti penting bukan saja bagi masyarakat selaku pemilik kedaulatan, dan para donator selaku penyumbang dana, tetapi juga penting bagi Pemerintah Daerah sendiri selaku Eksekutif, terlebih bagi DPRD yang secara fungsional memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan (Ireeuw, 2019). Berdasarkan berita yang dimuat pada (suaramerderkasolo.com) pada tahun 2018, Karanganyar menjadi yang tercepat dalam memperoleh status WTP dari BPK meski sebetulnya belum masanya. Menurut Juliyatmono, sekarang ini status WTP sudah bukan kebanggaan lagi, sehingga perlu terobosan khusus sehingga Karanganyar mencoba menjadi daerah tercepat untuk dinilai

BPK dan bisa. Karena itu perlu dicari terobosan WTP plus, untuk semua penghargaan yang kini sudah menjadi sesuatu yang tidak lagi istimewa. Artinya dia mendorong semua OPD di daerah, untuk mempercepat laporannya.

Salah satu pengukuran kinerja dapat dilihat dari kinerja keuangannya. Pengelolaan keuangan diperlukan dalam menentukan kinerja pemerintah. Pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kinerja menunjukkan adanya akuntabilitas kinerja yang terdapat keterkaitan antara sasaran strategis yang ingin dicapai dengan jumlah dana yang dialokasikan maka dapat diasumsikan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik mempunyai pengaruh terhadap kinerja satu instansi atau organisasi. Hal tersebut didukung dengan hasil penelitian Lintong (2017) dan Salle (2018) bahwa pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian Ireeuw (2019) bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah. Kinerja pemerintah juga dilihat dari akuntabilitas publik. Akuntabilitas menjadi suatu kebutuhan didalam pengelolaan pemerintah termasuk bidang keuangan. Dengan adanya penerapan akuntabilitas akan tercipta kinerja instansi yang lebih baik. Hal tersebut didukung dengan hasil penelitian Novantiati, dkk (2019) yaitu akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian Jitmau, dkk (2018) menyatakan akuntabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Kinerja yang dicapai oleh pemerintah daerah dalam hal keuangan, tidak lepas dari peran pengawasan internal. Pengawasan internal digunakan untuk mengontrol kegiatan secara efektif dan efisien agar kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan suatu pemerintah maka pengawasan internal berpengaruh pada kinerja pemerintah. Kinerja pemerintah daerah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi (Mahsun, 2016). Kinerja program berhubungan dengan tanggungjawab pemerintah atas amanat yang diberikan dari masyarakat untuk mewujudkan akuntabilitas publik, hal tersebut karena pemerintah berkewajiban untuk mengelola program pembangunan dalam rangka menjalankan pemerintahannya.

Salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (Mahmudi, 2015). Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip good corporate governance berkaitan dengan pertanggungjawaban pimpinan atas keputusan dan hasil yang dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Prinsip akuntabilitas digunakan untuk menciptakan sistem kontrol yang efektif berdasarkan distribusi kekuasaan pemegang saham, direksi dan komisaris.

Menurut Mulyadi (2010) pengawasan internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Dengan adanya pengawasan yang efektif dan sistematis terhadap pengelolaan keuangan daerah, maka pelaporan keuangan yang merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah mampu bersifat transparan untuk memberikan keyakinan bahwa informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan tersebut sudah benar atau valid (Mahayuni dkk, 2017). Menurut Lintong, dkk (2017), pengawasan internal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil ini bertentangan dengan penelitian Rosmarini (2016) bahwa pengawasan intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah.

2. Metodologi

Penelitian merupakan jenis penelitian survei dengan mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpul data yang diberikan kepada OPD di Kabupaten Karanganyar Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Aparatur Sipil Negara berjumlah 1.523 orang yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar yaitu sebanyak 41 (empat puluh satu) OPD, yang terdiri dari dinas/badan/kantor sebanyak 24 (dua puluh empat), kecamatan sebanyak 17 (tujuh belas). Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah bagian keuangan disetiap OPD. Teknik analisis data dimulai dengan melakukan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi dan uji MRA (*moderating regression analysis*).

3. Hasil dan Pembahasan

Sebelum dilakukan pengujian terhadap hipotesis, maka dilakukan langkah-langkah sebelum pengujian menggunakan analisis regresi. Instrumen Akuntabilitas (9 butir pernyataan), Pengawasan Internal (5 butir pernyataan), dan Kinerja pemerintah (9 butir pernyataan) melalui uji Korelasi Pearson menunjukkan semua butir pernyataan valid, ditunjukkan dengan $p(0,000) < 0,05$, sedangkan berdasarkan hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh instrumen variabel akuntabilitas, pengawasan internal, dan kinerja pemerintah daerah dinyatakan reliabel ditunjukkan dengan nilai Cronbach Alpha $> 0,60$. Analisis selanjutnya dengan melakukan uji asumsi klasik. Berdasarkan hasil pengujian didapatkan hasil bahwa semua instrumen dalam penelitian ini lolos dalam uji multikolinieritas, autokorelasi, heteroskedastisitas dan normalitas, sehingga semua instrumen dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian.

Tabel 1. Analisis Regresi

Variabel	<i>Coefficient</i>	<i>t-test</i>	<i>Sig.</i>
(<i>Constant</i>)	11.071	4.099	.000
Akuntabilitas	.324	3.395	.001
<i>R</i> ²	0,466		
<i>Adj.R</i> ²	0,454		
<i>F-test</i>	37.576		0,000

Pada tabel 1 menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Pengaruh ini signifikan dan positif, artinya dengan akuntabilitas yang tinggi dapat berdampak pada meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah yang ada di Kabupaten Karanganyar. Namun, Apabila akuntabilitas yang dicapai rendah maka rendah pula kinerja pemerintah daerah. Akuntabilitas merupakan suatu wujud pertanggungjawaban atas wewenang dan tugas diberikan. Pertanggungjawaban tersebut dapat digunakan untuk menilai atau mengevaluasi kegiatan yang sudah dilakukan sudah sesuai dengan tujuan dan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Novatiani (2019) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah. Dalam pemerintah daerah, masalah akuntabilitas menjadi suatu kebutuhan untuk mengelola pemerintah termasuk bidang keuangan. Dengan diterapkannya akuntabilitas akan tercipta kinerja instansi yang lebih baik. Namun, konsep teori tersebut berbeda dengan penelitian Jitmau, dkk (2018) yang menyatakan akuntabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Tabel 2. Moderation Regression Analysis (MRA)

Model		Coefficients ^a			T	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	69.262	24.935		2.778	.006
	Akuntabilitas	-.843	.662	-.886	-1.273	.205
	Pengawasan Internal	-2.304	1.091	-1.578	-2.112	.037
	Moderasi	.063	.029	2.573	2.176	.031

a. *Dependent Variable: Kinerja Pemerintah Daerah*

Pada tabel 2 menyatakan bahwa secara individu variabel akuntabilitas dan pengawasan internal mempunyai probabilitas $0,205 > 0,05$ dan $0,037 < 0,05$. Hal ini berarti variabel akuntabilitas secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Variabel moderasi mempunyai nilai probabilitas $0,031 < 0,05$. Hal ini berarti pengawasan internal merupakan variabel moderasi dari pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah daerah.

Menurut Rosmarini (2016) Pengawasan intern merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh pimpinan, pegawai, dan personil satuan usaha lainnya, yang dirancang untuk mendapat keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan. Pengelolaan keuangan adalah pengalokasian atas dana yang diberikan untuk digunakan sesuai kebutuhan dan tepat sasaran untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan. Maka pengawasan internal digunakan supaya pihak dalam pengelolaan keuangan bisa tepat sasaran agar tujuan suatu pemerintah tercapai dan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Menurut Mardiasmo (2009) kewajiban pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principle) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung-jawaban tersebut. Pengawasan internal berpengaruh dalam pertanggungjawaban amanah yang diberikan supaya sesuai dengan yang sudah ditetapkan untuk mencapai suatu tujuan pemerintah agar tidak terjadi kecurangan dalam melakukan kegiatan.

4. Kesimpulan dan Saran

Sebagai kesimpulan penelitian ini adalah bahwa kinerja pemerintah merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan dalam pengelolaannya. Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintahan tersebut, terutama kinerja pemerintah dari aspek keuangannya. Hasil analisis menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki dampak untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Apabila aparatur memiliki akuntabilitas yang baik, maka berdampak positif terhadap kinerja pemerintah dari aspek keuangan. Namun, pengaruh ini akan lebih baik apabila disukung dengan pengawasan internal yang dilakukan dapat optimal.

Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah, perlunya bagi eksekutif untuk memperhatikan pada para aparaturnya untuk senantiasa ditingkatkan. Selain itu, masalah pengawasan internal juga menjadi perhatian untuk menjaga kinerja keuangan pemerintah yang lebih baik. Sedangkan saran untuk penelitian selanjutnya perlu memperhatikan aspek lain untuk dianalisis lebih lanjut mengenai variabel yang digunakan untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah yang lainnya.

Daftar Pustaka

- Halim, Abdul. 2009. *Akuntansi sector Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Salemba Empat. Jakarta.
- <https://suaramerdekasolo.com/2019/04/28/karanganyar-kembali-raih-kinerja-terbaik-pemerintahan/>. Diakses pada tanggal 26 September 2019
- Ireeuw, Layuk, Rante. 2019. "Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Jayapura)". *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*. Vol. 14, No. 1, p. 87-99.
- Jensen, C., & Meckling, H. 1976. Theory of the Firm : Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*. Vol. 3, p. 305–360. Jitmau, Kalangi dan Lambey. 2017. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Fungsi Pemeriksaan Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris di Kabupaten Sorong)". *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"*. Vol. 8, No. 1, p. 276-286.
- Lintong, dkk. 2017. "Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengawasan Internal terhadap Kinerja Pemerintah Kota Kotamobagu". *Jurnal Accountability*. Vol. 06, No. 01, p. 118-127.
- Mahayuni, Dkk. 2017. "Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem". *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol. 8, No. 2.
- Mahmudi (2015), *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Kedua. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mohamad, Mahsun. 2016. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE-YOGYAKARTA. Yogyakarta.
- Mulyadi. 2010. *Sistem akuntansi*. Cetakan Kelima. Salemba Empat. Jakarta.
- Novatiani, dkk. 2019. "Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Instansi Pemerintah". *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*. Vol. 10, No. 1, Maret, p. 51-61.
- Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Rasdianto, Erlina. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Aktual*. Brama Ardian.
- Rosmarini, Tri. 2016. "Pengaruh Pengawasan Intern, Sistem Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah". *Jom Fekon*. Vol. 3, No. 1, p. 950-964.

Salle, Agustinus dan C.D. Matani. 2018. "Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada SKPD Pemerintah Kota Jayapura)". *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*. Vol. 13, No. 2, p.105-122.